



OPTIMALISASI ADMINISTRASI UMUM KANTOR DESA BOJONGCAE (STUDI KASUS DESA BOJONGCAE KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK-BANTEN)

Lisa Agustina¹, Sahroni², dan Eneng Arsiah³
Program Studi Ilmu Administrasi Publik STISIP Banten Raya
lisagustina1988@gmail.com

ABSTRAK

Ide dasar pengabdian masyarakat ini didasarkan pada situasi problematik yang dihadapi mitra yakni mengenai administrasi kantor umum desa. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk *knowledge sharing* dengan pendekatan andragogi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana setelah dilakukan *interview* dengan narasumber melalui teknik *purposive sampling* dan observasi mendalam dengan melihat kondisi kantor desa Bojongcae ditemukan permasalahan yakni tidak adanya struktur organisasi perangkat desa, dokumentasi profil kepala desa dari awal berdirinya desa sampai dengan kepala desa saat ini dan tabel informasi mengenai desa Bojongcae sehingga menyulitkan dalam mendapatkan informasi mengenai aparatur desa, serta kurang tertata rapinya arsip/naskah surat-menyurat sehingga menyulitkan dalam pencarian arsip yang dibutuhkan. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan penyuluhan terkait administrasi umum kantor desa kepada pemerintah desa beserta lembaga kemasyarakatan desa utamanya RT dan RW desa Bojongcae sebagai upaya dalam mengoptimalkan administrasi umum kantor desa Bojongcae.

Kata Kunci: Administrasi, Administrasi umum, Optimalisasi administrasi, Administrasi umum desa

ABSTRACT

The basic idea of community service is based on the problematic situation faced by partners, namely regarding the administration of the village general office. Community service activities are carried out in the form of knowledge sharing with an andragogy approach. This research was conducted with a qualitative method where after interviews with resource persons through purposive sampling techniques and in-depth observations by looking at the condition of the Bojongcae village office, problems were found, namely the absence of an organizational structure for village officials, documentation of the village head's profile from the beginning of the village to the current village head and the information table about the village of Bojongcae makes it difficult to obtain information about the village apparatus, and the archives/corresponding documents are not well-organized, making it difficult to find the archives needed. The solution offered is to provide counseling related to the general administration of the village office to the village government and village community institutions, especially the RT and RW of Bojongcae village as an effort to optimize the general administration of the Bojongcae village office.

Keyword: Administration, General administration, Administration optimization, Village general administration



PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam pasal 200 UU No.32 tahun 2004. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerin-

tahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Secara umum gambaran proses administrasi pemerintah desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Mulai dari proses pelayanan publik kepada masyarakat, proses keuangan dan proses administrasi lainnya. Kelengkapan alat tulis kantor juga telah memadai. Akan tetapi, setelah dilakukan observasi mendalam dengan melihat kondisi kantor desa Bojongcae, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) tidak adanya dokumentasi foto kepala desa dari awal berdirinya desa Bojongcae sampai dengan kepala desa sekarang, sehingga tidak diketahui berapa banyak kepala desa yang telah memimpin desa Bojongcae; (2) Tidak adanya struktur organisasi perangkat desa dan tabel informasi mengenai desa Bojongcae sehingga menyulitkan dalam mendapatkan informasi mengenai aparatur desa; serta (3) Kurang tertata rapinya arsip/naskah surat-menyurat sehingga menyulitkan dalam pencarian arsip yang dibutuhkan. Dari permasalahan tersebut diatas, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan penyuluhan terkait administrasi umum kantor desa kepada pemerintah desa Bojongcae sebagai upaya dalam mengoptima-



lisasikan administrasi umum kantor desa Bojongcae.

Definisi Administrasi

Secara Etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *ad* dan *ministrare* yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi. Di Indonesia dikenal dalam dua bahasa yaitu *administratie* dari bahasa Belanda dan *clerical work, paper work*, atau *office work* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, administrasi dikenal sejak awal masuknya sistem pemerintahan Belanda di Indonesia yaitu sistem administrasi publik klasik. Istilah *administratie* mencakup pengertian *stelselmatige verkrijging, en verwerking van gegevens* yang berarti tata usaha atau administrasi dalam arti sempit dan *bestuur en beheer* yang memiliki arti manajemen kegiatan- kegiatan organisasi dan sumber dayanya (finansial, personel, materil, gudang dan sebagainya).

Sedangkan dalam bahasa Inggris meliputi definisi administrasi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit adalah kegiatan berupa pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau institusi. Administrasi dalam arti luas adalah proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Menurut Sondang P Siagian “Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, (Syafri,

M.si, 2012: Studi Tentang Administrasi Publik).

Definisi Administrasi Desa

Sebagaimana pendapat ahli bahwa, “... administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa” (Nurcholis, 2011, 135), berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa administrasi tidak hanya berjalan dalam lingkup daerah, namun di lingkup desa juga dijalankan suatu proses kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaran suatu pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memenuhi unsur-unsur dan prinsip-prinsip administrasi.

Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan, desa atau yang disebut lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data tertentu yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap desa-desa. Untuk membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban selaku pimpinan pemerintah desa, maka dibentuklah sekre-



tariat desa selaku unsur staf, dikepalai sekretaris desa yang membawahi kepala-kepala urusan seperti: Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pemberdayaan masyarakat, Kepala Urusan Kesra (Kesejahteraan masyarakat), Kepala Dusun. Apabila kepala desa berhalangan maka sekretaris desa menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari kepala desa. Sistem administrasi masyarakat ditingkat desa di Indonesia sudah memiliki tata struktur yang baik dari mulai adanya kepala desa sampai staf-staf pembantu kepala desa yang sering disebut juga perangkat desa.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* artinya adalah cara atau menuju suatu jalan. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, "...penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten" (Ruslan, 2003, 24). Dapat dipahami dari pembahasan tersebut bahwa metode merupakan salah satu unsur dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung dan sebenarnya dari lapangan dan diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, dan RT/RW setempat. Sumber data sekunder bersumber dari arsip, dokumen-dokumen, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan sumber relevan lainnya untuk melengkapi informasi yang diperlukan peneliti. Fokus dalam penelitian ini yaitu administrasi umum kantor desa Bojongcae. Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sampel sumber data dan teknik pengumpulan data adalah hasil wawancara (interview) mendalam. Peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan informan/narasumber berdasarkan masalah yang akan diteliti. Disamping wawancara, peneliti juga melakukan metode observasi. Dari Observasi yang dilakukan sangat memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena beberapa sebab tidak diungkapkan secara terbuka dalam wawancara. Sehingga peneliti dapat menemukan data yang dimaksud dan dapat mendeskripsikannya tanpa melalui wawancara dengan narasumber. Dalam hal teknik analisis data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradly. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa



aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh (Sugiyono, 183, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Desa Bojongcae menjadi salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak. Desa Bojongcae merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari desa Panancangan, karena populasi penduduk yang dinilai sudah melebihi batas wilayah maka dilakukan pemekaran sehingga lahirlah desa Bojongcae. Dari pertama berdiri hingga sekarang desa Bojongcae memiliki nama yang sama dan tidak mengalami perubahan. Desa Bojongcae terdiri dari 4 RW dan 13 RT. Secara geografis desa Bojongcae memiliki luas wilayah 169,2 Ha dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan wilayah desa Bojongpandan Kematan Tunjungteja Kabupaten Serang, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Cibadak Kecamatan Cibadak-Lebak, sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Cisangu Kecamatan Cibadak-Lebak dan sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung-Lebak.

2. Administrasi Umum Desa

Secara umum gambaran proses administrasi pemerintah desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Mulai dari proses pelayanan publik kepada masyarakat, proses keuangan dan proses administrasi

lainnya. Kelengkapan alat tulis kantor pun telah memadai namun berdasarkan hasil interview mendalam dengan narasumber yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, dan RT/RW desa Bojongcae ditemukan permasalahan administrasi umum yaitu tidak adanya kelengkapan administrasi seperti tidak adanya dokumentasi foto kepala desa dari awal berdirinya desa Bojongcae sampai dengan kepala desa sekarang, sehingga tidak diketahui berapa jumlahnya kepala desa yang telah memimpin desa Bojongcae, tidak dipasangnya struktur organisasi perangkat desa dan tabel informasi mengenai desa Bojongcae sehingga menyulitkan dalam mendapatkan informasi mengenai aparatur desa, serta kurang tertata rapinya arsip/naskah surat-menyurat sehingga menyulitkan dalam pencarian arsip yang dibutuhkan. Dari permasalahan tersebut, solusi yang diberikan kepada pemerintah desa Bojongcae adalah dengan membuat dokumentasi foto kepala desa yang pernah menjabat sebanyak 10 kepala desa yang terverifikasi rekam jejaknya; membuat kelengkapan struktur organisasi dan informasi lain yang berhubungan dengan informasi desa Bojongcae; serta merapikan odner-odner arsip (pengarsipan) dan membuat label (labeling) masing-masing odner tersebut sehingga memudahkan dalam proses pencarian arsip. Dalam proses pengarsipan ini juga disampaikan penyuluhan kepada RT/RW setempat mengenai administrasi umum yang berkaitan langsung dengan RT/RW seperti penginputan surat pengantar RT/RW untuk proses administrasi umum mengenai migrasi penduduk (penduduk datang dan pergi), kelahiran dan kematian, serta perijinan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana



sebelumnya tidak ditemukan pengarsipan pengantar dari RT maupun RW desa Bojongcae terkait administrasi umum tersebut. Sehingga diharapkan melalui surat pengantar dari RT/RW tersebut data kependudukan dalam database desa akan lebih valid sesuai dengan kebutuhan update data kependudukan dan profil desa Bojongcae.

KESIMPULAN

Mengacu pada kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa administrasi umum seperti struktur organisasi dan profiling perkantoran desa juga dibutuhkan dalam memberikan informasi kantor desa bagi pengunjung maupun kebutuhan kantor desa itu sendiri. Selain itu dalam pemutakhiran data kependudukan juga dibutuhkan proses administrasi secara langsung dari RT/RW sehingga data kependudukan desa lebih valid adanya. Dengan demikian desa juga dapat mengupdate data dan profil desa Bojongcae secara berkala.

Berdasarkan rumusan simpulan yang ada maka disarankan sebagai berikut: agar terjadi akselerasi dalam administrasi

umum kantor desa Bojongcae; pendataan dapat ditingkatkan secara berkala ke dalam sistem komputer serta agar dapat mengupdate profil desa secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ruslan, S.H.M.M., Rosady. 2003. *Metode Penelitian Publick Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, M.Si.,Prof. Dr. H. Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Ruslan, S.H.M.M.,Rosady. 2003. *Metode Penelitian Publick Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Administrasi Desa Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.